

Peranan Audit Operasional Pada Unit Karya Pendidikan Sekolah Dasar Katolik “X” Di sumenep

Rudi Candra

Fakultas Bisnis dan Ekonomika Jurusan Akuntansi Manajemen

Vincentius.rudi91@gmail.com

Abstrak – Kualitas pendidikan dasar dan menengah di Indonesia masih tergolong rendah, disebabkan karena pemenuhan standar pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang masih minim, disertai dengan maraknya kasus korupsi di bidang pendidikan. Dalam upaya peningkatan kualitas sekolah, perlu adanya program evaluasi secara rutin, salah satunya melalui audit operasional. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai penerapan audit operasional dalam mengevaluasi pengendalian internal di Sekolah Dasar Katolik “X” di Sumenep. Audit dilaksanakan melalui beberapa tahap, dimana secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi tiga tahap, yaitu: perencanaan atau survei pendahuluan, pelaksanaan dan pelaporan. Dari pelaksanaan di lapangan menghasilkan temuan-temuan audit yang merupakan kelemahan pada kegiatan operasional di SDK. “X” – Sumenep. Kemudian dari temuan-temuan audit tersebut dilakukan pengembangan yang bertujuan untuk memberikan rekomendasi pada tahap pelaporan agar dapat dilakukan perbaikan oleh pihak manajemen. Dari pelaksanaan audit operasional ini, diharapkan dapat meningkatkan mutu pelayanan pendidikan di SDK. “X” – Sumenep, dengan ditunjang oleh transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pelayanan pendidikan.

Kata Kunci – Audit Operasional, Pengendalian Internal, Pendidikan Dasar dan Menengah, Sekolah

Abstract - The quality of primary and secondary education in Indonesia is still relatively low, due to low service standards in primary and secondary education accompanied by unchecked corruption within the Department of Education’s bureaucracy. In an effort to improve the quality of schools, there is a need for program evaluation on a regular basis, one of which is operational auditing. The purpose of this research is to gain a extensive understanding of the application of the operational audit in evaluating internal control at Catholic Primary School "X" in Sumenep. Audits are carried out in several stages, which can be broadly grouped into three stages, namely: planning or preliminary survey, implementation, and reporting. From implementation in the field, the operational audit identifies weaknesses in operational activities in the Catholic Primary School "X" - Sumenep. From the findings of the audit carried out a development stage is carried out that aims to provide recommendations on the reporting stage in order to assist the management division in repairing these issues. The implementation of this audit is expected to improve the quality of education services in the Catholic Primary School "X" -Sumenep, aiming to reform educational institutions by setting a foundation of transparency and accountability.

Key Words – Operational Audit, Internal Control, Primary and Secondary Education, School.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hak dasar semua warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah telah mengalokasikan dana yang cukup besar untuk dunia pendidikan yakni mencapai Rp. 371 triliun dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) pada tahun 2014. Namun anggaran pendidikan yang besar tersebut berbanding terbalik dengan kualitas pendidikannya, berdasarkan Indeks Perkembangan Pendidikan (Education Development Index, EDI), Indonesia berada pada peringkat ke-69 dari 127 negara pada 2011. Kualitas pelayanan pendidikan di Indonesia juga dapat berpengaruh terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ditandai oleh peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM). Berdasarkan laporan terbaru Program Pembangunan PBB tahun 2013, Indonesia menempati posisi 121 dari 185 negara dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan angka 0,629.

Tingkat kualitas pendidikan di Indonesia yang masih tergolong rendah disebabkan oleh pemenuhan standar pelayanan Sekolah Dasar dan Menengah yang masih minim. Hal ini dapat dilihat dari belum terpenuhinya kualitas dan kualifikasi guru, fasilitas pembelajaran, dan tersedianya bahan pembelajaran. Menurut Direktur Jenderal Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Hamid Muhammad, guru SD dengan kualifikasi S1 hanya mencapai 62 persen. Pemenuhan fasilitas belajar mengajar juga mengalami persoalan yang besar, berdasarkan hasil survei Minimum Service Standards Capacity Development Program (MSS-CDP) yang dilakukan pada April hingga Mei 2014, pemenuhan fasilitas belajar yang meliputi kebutuhan ruang kelas, meja-kursi dan papan tulis di SD seluruh Indonesia hanya mencapai 26 persen.

Rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia juga tidak terlepas dari maraknya kasus korupsi di bidang pendidikan. Anggaran pendidikan selama ini dipermainkan oleh para pemangku kepentingan. Menilik data Indonesian Corruption Watch (ICW) tentang korupsi di bidang pendidikan pada kurun waktu 2003-2013 yang mencapai 296 kasus dengan kerugian hingga Rp.619 milyar.

Menilik data-data kondisi penyelenggaraan pelayanan pendidikan di Indonesia tersebut, maka diperlukan adanya tindakan perbaikan dalam kegiatan operasional pada sekolah-sekolah dan lembaga pendidikan lainnya. Audit operasional dapat berperan penting dalam mengevaluasi penyelenggaraan pendidikan, agar dapat diketahui berbagai permasalahan yang terjadi dalam kegiatan operasional di sekolah, penyebab terjadinya permasalahan tersebut, kemudian dipikirkan solusi dari permasalahan-permasalahan tersebut. Dari pelaksanaan audit operasional ini, diharapkan dapat meningkatkan mutu pelayanan pendidikan dengan ditunjang oleh transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pelayanan pendidikan.

METODE PENELITIAN

Metode perolehan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui *interview semi structured*, analisis dokumen, studi pustaka, kuesioner, dan observasi. *Interview semi structured* terhadap kepala sekolah, komite sekolah, beserta seluruh

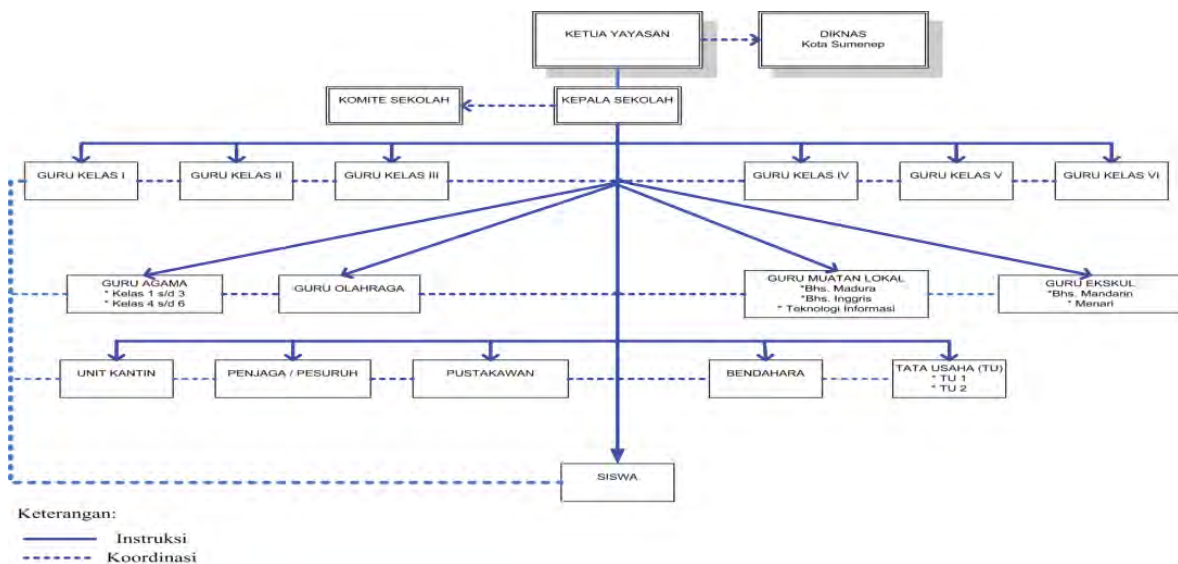
pendidik dan tenaga kependidikan¹ bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai berbagai permasalahan dan kelemahan di SDK. “X”. Analisis dokumen dilakukan terhadap buku pedoman SDK. “X” dan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur penyelenggaraan pendidikan sekolah dasar. Kuesioner pengendalian internal yang dibagikan ke kepala sekolah, komite sekolah, beserta seluruh pendidik dan tenaga kependidikan bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai pengendalian internal di SDK. “X”. Peneliti juga membagikan kuesioner ke orang tua/wali murid untuk memperoleh informasi tentang penilaian kualitas penyelenggaraan pendidikan di SDK. “X” dari sudut pandang orang tua/wali murid. Studi pustaka dilakukan untuk membantu memahami langkah-langkah yang harus dilakukan untuk dapat mengidentifikasi *critical problem area*. Metode pengumpulan data juga dilakukan melalui pengamatan atau observasi terhadap aktivitas utama di SDK. “X” yang terdiri dari aktivitas pembelajaran, aktivitas pembinaan minat bakat siswa, dan aktivitas kerohanian. Observasi juga dilakukan terhadap aktivitas pengelolaan manajemen yang meliputi manajemen pendidik dan tenaga kependidikan, prinsip-prinsip pengorganisasian, standar keamanan dan keselamatan di lingkungan sekolah, serta transparansi pengelolaan dana pendidikan. Metode-metode pengumpulan data ini juga bertujuan sebagai dasar pembuatan *working paper* yang merupakan hasil dari program pengujian terinci untuk setiap *critical problem area*. *Working paper* inilah yang menjadi dasar analisis untuk memberikan rekomendasi yang tepat bagi SDK. “X”. Peneliti juga menggunakan COSO *framework* dalam mengevaluasi pengendalian internal yang ada di SDK. “X”.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Umum Organisasi

Sekolah Dasar Katolik (SDK). “X” di Sumenep merupakan salah satu pelaksana program wajib belajar di tingkat satuan pendidikan dasar kesetaraan swasta yang ada di Kota sumenep. SDK. “X” Sumenep berada di bawah naungan Yayasan Karya “XYZ” yang berpusat di Kota Malang. Yayasan ini dikelola oleh suster (biarawati) dari Kongregasi Suster-Suster PIJ (*Pauperis Intantis Jesu*) yang berarti Suster dari Kanak-Kanak Yesus yang miskin. SDK. “X” sebagai pelaksana pendidikan dasar harus memiliki kebijakan, prosedur, peraturan dan tujuan yang jelas agar setiap programnya dapat dilaksanakan dengan baik dan selaras dengan visi-misi yayasan. Berikut ini struktur organisasi di SDK. “X” Sumenep

¹ Menurut PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2007, tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.



Gambar 1 Struktur Organisasi di SDK. “X” Sumenep
(Sumber: Data internal SDK “X”)

Tahap-tahap Audit Operasional
Survei Pendahuluan

Pemahaman atas Entitas yang Diaudit

Pada tahap ini peneliti mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk memahami entitas yang diaudit. Informasi yang diperoleh antara lain mengenai visi, misi, tujuan dan sasaran SDK. “X”; program dan kegiatan di SDK. “X”; struktur organisasi; serta pemahaman atas input, proses, output, dan outcome.

Evaluasi Pengendalian Internal Organisasi

Peneliti akan menggolongkan komponen-komponen pengendalian internal berdasarkan COSO *framework* agar dapat lebih mudah dipahami dan menjadi dasar dalam memperoleh informasi yang memadai mengenai pengendalian internal yang ada di SDK. “X” (Tabel 1).

Tabel 1 Pengendalian Internal pada SDK. “X” berdasarkan COSO *Framework*

Komponen COSO <i>Framework</i>	Pengendalian Internal pada SDK. “X” Sumenep
1. Lingkungan pengendalian	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya nilai-nilai Kekatolikan yang ditanamkan, seperti kasih, persaudaraan, kesederhanaan, dan kegembiraan. • Adanya standar etika, pedoman perilaku, dan kebijakan-kebijakan yang jelas bagi pendidik dan peserta didik secara tertulis. • Beberapa pendidik dan tenaga kependidikan belum memenuhi syarat kualifikasi akademik minimum yang ditetapkan oleh pemerintah. • Gaya operasi manajemen di SDK. “X” memiliki ciri khas, yakni untuk posisi penting, seperti

	<p>jabatan kepala sekolah dan bendahara dipimpin langsung oleh suster-suster dari Kongregasi PIJ (<i>Pauperis Infantis Jesu</i>).</p> <ul style="list-style-type: none"> • SDK. “X” memiliki struktur organisasi yang tertulis. Namun terdapat perbedaan antara struktur organisasi dan penjelasannya di dokumen <i>job description</i>, begitu pula dengan pelaksanaannya di lapangan. • Pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab sudah tercantum dalam dokumen <i>job description</i> pada buku pedoman organisasi. Namun pada beberapa bagian <i>job description</i> masih belum di revisi sejak diterima dari Yayasan Pusat, sehingga tidak relevan dengan kondisi di SDK. “X”.
<p>2. Penaksiran risiko</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pengidentifikasian risiko di SDK. “X” belum dilakukan secara formal (sistematis dan terdokumentasi). • Adanya risiko yang dapat dikontrol dan diatasi seperti risiko terjadinya perkelahian antar siswa/i. • Namun terdapat pula risiko yang tidak dapat dikontrol yaitu masalah agama, sebagai kaum minoritas, siswa/i di SDK. “X” sering diolok-olok oleh siswa/i sekolah lain. Selain itu, risiko perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang begitu pesat dan tuntutan penggunaan bahasa asing, salah satunya Bahasa Inggris juga tidak dapat dihindari.
<p>3. Aktivitas pengendalian</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya perangkapan jabatan yang menyebabkan pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) tidak fokus dalam melaksanakan tugasnya. • Ada beberapa jabatan yang tidak dijelaskan rincian tugasnya pada dokumen <i>job description</i>. • Proses pengotorisasian transaksi tidak sesuai dengan kewenangannya masing-masing bagian. • Kurang memadainya standar keamanan dan keselamatan di lingkungan SDK. “X”, seperti tidak adanya petugas keamanan dan tidak adanya kamera CCTV. • Pengendalian fisik atas aset di SDK. “X” masih kurang baik, karena barang-barang inventaris yang dimiliki sekolah sering hilang atau rusak.
<p>4. Informasi dan komunikasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Setiap ada peraturan atau kebijakan baru selalu disosialisasikan kepada pendidik dan tenaga

	<p>kependidikan (PTK) dalam rapat rutin tahunan atau bulanan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apabila ada informasi penting atau permasalahan yang harus segera dibahas, maka diadakan <i>briefing</i> saat pagi hari sebelum dimulainya kegiatan belajar-mengajar. • Informasi terkait pengelolaan dana pendidikan kurang terbuka, karena laporan pengelolaan dana pendidikan tersebut tidak dilaporkan ke seluruh warga sekolah dan orang tua/wali murid.
<p>5. Pemantauan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya kegiatan supervisi yang dilakukan oleh yayasan pusat untuk mensosialisasikan kebijakan-kebijakan kepada pendidik dan tenaga kependidikan (PTK). • Pemeriksaan keuangan dilakukan oleh Tim Keuangan Pusat dari Kongregasi Suster-Suster <i>Pauperis Instantis Jesu</i> (diluar Yayasan Karya “XYZ” Pusat). Tetapi pemeriksaan ini hanya dilakukan terhadap suster-suster yang bertugas di unit karya, biasanya dilaksanakan sebelum proses serah terima jabatan kepala sekolah. • Tidak pernah dilakukan pemeriksaan secara independen atas pengendalian internal yang diterapkan di SDK. “X”.

Identifikasi Area Kunci

Analisis untuk menentukan area kunci dengan menggunakan pendekatan faktor pemilihan (*selection factors*) pada aktivitas utama dan aktivitas pengelolaan manajemen SDK. “X”. Aktivitas utama meliputi:

- a. Aktivitas pembelajaran
- b. Aktivitas pembinaan minat bakat siswa, dan
- c. Aktivitas kerohanian

Sedangkan aktivitas pengelolaan manajemen meliputi:

- a. Manajemen pendidik dan tenaga kependidikan,
- b. Prinsip-prinsip pengorganisasian,
- c. Standar keamanan dan keselamatan di lingkungan sekolah, dan
- d. Transparansi pengelolaan dana pendidikan.

Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan pemeringkatan atas area kunci adalah sebagai berikut:

- a. *Risiko manajemen*, yaitu risiko bahwa entitas atau area yang akan diaudit melakukan tindakan ketidakefisienan dan ketidakefektifan.
- b. *Signifikansi*, yaitu signifikansi dari suatu area audit yang berkaitan dengan tingkat besar kecilnya pengaruh kegiatan tersebut terhadap entitas secara keseluruhan.

- c. *Dampak potensial dari audit operasional*, yaitu nilai tambah yang diharapkan dari audit tersebut, apakah audit yang dilaksanakan akan menimbulkan perubahan berarti atau tidak bagi entitas yang diaudit.
- d. *Auditabilitas*, berkaitan dengan kemampuan auditor dalam melaksanakan audit.

Peneliti menggunakan matriks pembobotan untuk menyeleksi area kunci dengan skor sebagai berikut:

- a. Tinggi : skor 3
- b. Sedang : skor 2
- c. Rendah : skor 1

Hasil pembobotan dimuat dalam matriks area kunci yang memuat rincian kegiatan atau program di SDK. “X” (lihat Lampiran 1), kemudian memberikan skor berdasarkan pertimbangan dari segi keahlian (*professional judgement*) yang dimiliki oleh auditor.

Dalam pemilihan area kunci berdasarkan pembobotan yang telah dilakukan, peneliti membaginya dalam tiga *range* berikut:

- a. Skor 1 s/d 4: rendah
- b. Skor 5 s/d 8: sedang
- c. Skor 9 s/d 12: tinggi

Prioritas yang diaudit adalah area-area yang termasuk dalam kategori ‘tinggi’.

Area kunci yang akan dinilai oleh auditor berdasarkan hasil analisis dalam pelaksanaan audit di lapangan, yaitu area kegiatan belajar mengajar dan area aktivitas pengelolaan manajemen, bila dijabarkan terdiri dari:

Area kegiatan belajar mengajar:

- a. Pembelajaran interaktif,
- b. Program pembelajaran dengan pengantar *bilingual* (termasuk program *English Day*), dan
- c. Penggunaan teknologi informasi dalam menunjang pembelajaran.

Area aktivitas pengelolaan manajemen:

- a. Manajemen pendidik dan tenaga kependidikan,
- b. Prinsip-prinsip pengorganisasian,
- c. Standar keamanan dan keselamatan di lingkungan sekolah, dan
- d. Transparansi pengelolaan dana pendidikan.

Tujuan dan Lingkup Audit

Tujuan audit untuk mengevaluasi pengendalian internal yang diterapkan di SDK. “X” Sumenep.

Lingkup audit mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Tahun anggaran yang diaudit adalah 2013/2014 (tahun pelajaran sebagai acuan tahun anggaran).
- b. Lingkup kegiatan yang diperiksa (diaudit) meliputi proses pelayanan pendidikan dan proses manajemen sekolah.
- c. Lokasi audit di SDK. “X” Sumenep.
- d. Lingkup audit *tidak* termasuk audit keuangan dan sistem komputerisasi informasi keuangan di SDK. “X”.

Kriteria Audit

Terdapat 4 (empat) kriteria utama dalam pemeriksaan (audit) ini, antara lain:

- a. Apakah SDK. “X” sudah menerapkan prinsip-prinsip pengorganisasian yang baik dalam keseluruhan penyelenggaraan dan administrasi sekolah?
- b. Apakah terdapat standar keamanan dan keselamatan yang memadai di SDK. “X”?
- c. Apakah proses penyelenggaraan pendidikan di SDK. “X” telah sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan?
- d. Apakah evaluasi kinerja di SDK. “X” telah dikelola dan dipertanggungjawabkan dengan baik?

Identifikasi Bukti Audit

Setelah kriteria audit ditetapkan, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi sumber dan jenis bukti yang diperlukan untuk mengevaluasi pengendalian internal yang diterapkan di SDK. “X”.

Penyusunan Laporan Survei pendahuluan

Laporan survei pendahuluan dibuat sebagai dasar untuk menentukan apakah suatu kegiatan audit akan dilanjutkan ke tahap pengujian terinci atau hanya cukup sampai pada tahap survei pendahuluan saja. Berdasarkan hasil survei pendahuluan dari tahap-tahap audit sebelumnya, Peneliti telah mengembangkan isu-isu audit yang signifikan. Isu audit tersebut antara lain terkait kurang maksimalnya sistem pengendalian internal, standar keamanan dan keselamatan yang kurang memadai, serta kegiatan belajar mengajar yang belum memenuhi visi-misi dan tujuan sekolah. Sehubungan dengan hal-hal tersebut, suatu audit operasional secara terinci sangat diperlukan untuk mengetahui sampai sejauh mana pengelolaan kinerja yang dilakukan oleh SDK. “X” serta tingkat penyimpangan yang terjadi, untuk kemudian memberikan rekomendasi bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

Penyusunan program pengujian terinci

Program pengujian terinci memuat hubungan antara tujuan audit dan langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut. Teknik audit yang digunakan dalam rangka pengumpulan bukti audit diidentifikasi berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh peneliti pada tahap sebelumnya. Rumusan garis besar teknik audit yang dilakukan meliputi:

1. Wawancara (*interview*),
2. Kuesioner,
3. Observasi, dan
4. Dokumentasi.

Pelaksanaan dan Pelaporan Audit Operasional

Pengerjaan Lapangan

Suatu rencana kerja audit yang telah disusun dalam bentuk program pengujian terinci akan membantu peneliti pada saat melakukan pekerjaan lapangan, dimana akan mengarahkan peneliti pada langkah-langkah yang akan dijalankan untuk memperoleh pemahaman dan bukti-bukti yang cukup memadai. Hasil dari pekerjaan di lapangan

dijadikan dasar dalam pembuatan *working paper*. *Working paper* inilah yang menjadi dasar analisis untuk memberikan rekomendasi yang tepat bagi SDK. "X".

Temuan Audit

Hasil pemeriksaan (audit) ini mendapatkan beberapa temuan negatif, antara lain:

1. Tenaga pendidik (guru) belum menggunakan pengantar *bilingual* (Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia) dan belum menggunakan perangkat teknologi informasi untuk menunjang pembelajaran, sebagaimana telah dicanangkan dalam tujuan sekolah dan dijelaskan pada *job description* bagi tenaga pendidik.
2. Metode pembelajaran di kelas cenderung monoton, karena kegiatan belajar mengajar lebih banyak dilakukan dengan cara mendikte materi-materi yang ada di buku dan mencatat materi yang ditulis guru di papan tulis.
3. Terjadi perangkapan jabatan pada beberapa jabatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) di SDK. "X" yang menyebabkan PTK tidak fokus dalam mengerjakan tugasnya. Perangkapan jabatan tersebut terjadi pada posisi bendahara SDK. "X" yang merangkap sebagai bendahara di unit karya lainnya dalam satu area (Poliklinik "X", Taman Kanak-Kanak "X", dan Biara "X"); Wali kelas III merangkap jabatan sebagai petugas kantin; serta kepala sekolah menangani keuangan kantin.
4. Beberapa PTK di SDK. "X" masih belum memenuhi syarat kualifikasi akademik minimum yang ditentukan oleh pemerintah.
5. Sering terjadi kehilangan atau kerusakan barang/perlengkapan sekolah dan susah untuk dilacak.
6. Belum terdapat alat pengawasan (misal: kamera CCTV) untuk memantau aset sekolah dan aktivitas PTK dan siswa/i di SDK. "X".
7. Tidak ada petugas keamanan saat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar.
8. Tidak ada sistem proteksi pasif dan/atau aktif untuk mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran.
9. Ada beberapa jabatan tenaga kependidikan yang tidak dijelaskan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya, antara lain: tidak adanya rincian tugas petugas kantin sekolah; dalam dokumen struktur organisasi terdapat fungsi petugas keamanan, padahal dalam praktiknya di lapangan tidak ada; kepala sekolah menangani keuangan kantin, padahal dalam *job description*-nya tidak meliputi tugas tersebut; serta petugas tata usaha sering mendapat tugas diluar tanggung jawabnya yang tercantum dalam *job description*.
10. SDK. "X" belum mempublikasikan laporan pengelolaan biaya investasi dan operasional maupun laporan keuangan kepada seluruh warga sekolah dan orang tua/wali murid.

Pengembangan Temuan Audit

Auditor membuat pengembangan terhadap temuan audit dari temuan-temuan negatif yang telah disebutkan

1. Critical Problem Area

Condition: Terjadi perangkapan jabatan pada beberapa jabatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) di SDK. "X" yang menyebabkan PTK tidak fokus dalam mengerjakan tugasnya. Perangkapan jabatan tersebut terjadi pada posisi bendahara

SDK. “X” yang merangkap sebagai bendahara di unit karya lainnya dalam satu area (Poliklinik “X”, Taman Kanak-Kanak “X”, dan Biara “X”); Wali kelas III merangkap jabatan sebagai petugas kantin; serta kepala sekolah menangani keuangan kantin untuk menggantikan tugas bendahara.

Criteria: Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) di SDK. “X” seharusnya melaksanakan tugas sesuai yang ada dalam *job description*.

Cause: Pihak sekolah merasa bahwa tidak perlu menambah karyawan baru karena jumlah siswa/i di SDK. “X” tidak begitu banyak.

Effect:

- Bendahara sulit ditemui apabila sedang bertugas di unit karya lainnya (Poliklinik “X”, Taman Kanak-Kanak “X”, dan Biara “X”), akibatnya kepala sekolah terkadang mengotorisasi transaksi-transaksi di SDK. “X”. Selain itu, karena tugas bendahara sangat kompleks, menyebabkan kepala sekolah harus terlibat dalam menangani keuangan kantin.
- Perangkapan jabatan petugas kantin yang sekaligus merupakan wali kelas III, menyebabkan kesulitan membagi waktu antara menangani urusan kantin dan mengajar, sehingga kadang terpaksa meninggalkan kelas untuk menyelesaikan urusan kantin.
- Memudahkan penyalahgunaan fungsi dari pihak kepala sekolah, karena kepala sekolah juga menangani keuangan.

Recommendation:

- Mengingat tugas bendahara yang begitu kompleks, sebaiknya menambah staf baru untuk menjabat sebagai bendahara, sehingga kepala sekolah tidak perlu terlibat lagi pada tugas-tugas yang seharusnya merupakan tanggung jawab bendahara. Paling tidak menambah satu orang staf, sehingga dapat berbagi tugas dengan bendahara lama dalam menangani keuangan di empat unit karya tersebut.
- Untuk pengelolaan kantin, sebaiknya kantin sekolah disewakan ke pihak luar, sehingga tidak perlu repot mengelola persediaan kantin dan pembuatan laporan-laporan yang terkait aktivitas kantin.

2. Critical Problem Area

Condition: Sering terjadi kehilangan atau kerusakan barang/perlengkapan sekolah dan susah untuk dilacak.

Criteria: SDK. “X” harus memiliki prosedur penyimpanan barang/ perlengkapan sekolah.

Cause: Banyaknya pihak-pihak yang meminjam barang/perlengkapan sekolah, tidak hanya dari SDK. “X” saja, tetapi unit karya lainnya dalam satu area (Poliklinik “X” Sumenep, Taman Kanak-Kanak “X” Sumenep, dan Biara “X” Sumenep) juga sering meminjam barang-barang tersebut. Selain itu, prosedur peminjaman barang juga sangat mudah, hanya perlu meminta kunci gudang ke kepala sekolah.

Effect: SDK. “X” akan mengalami kerugian material apabila sering terjadi kehilangan atau kerusakan barang/perlengkapan sekolah.

Recommendation: Sebaiknya disediakan surat peminjaman barang, jadi jika ada pihak-pihak yang akan meminjam barang, harus mengisi surat terlebih dahulu. Surat tersebut ditandatangani oleh peminjam barang dan koordinator/penanggungjawab

inventaris sekolah. Selain itu, di sekitar gudang dapat diberi alat pengawasan seperti kamera CCTV, sehingga barang/perengkapan sekolah dapat dipantau dengan mudah.

3. Critical Problem Area

Conditions: Sistem keamanan dan keselamatan di SDK. “X” kurang memadai, karena tidak adanya alat pengawasan (misal: kamera CCTV) untuk memantau aset sekolah dan aktivitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta siswa/i di sekolah; tidak ada petugas keamanan saat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar; serta tidak adanya sistem proteksi pasif dan/atau aktif untuk mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran (misal: tabung pemadam kebakaran).

Criteria:

- Adanya pengendalian fisik atas aset yang memadai.
- Mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional R.I. No. 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA: ”Bangunan gedung dilengkapi sistem proteksi pasif dan/atau proteksi aktif untuk mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran dan petir”.
- SDK. “X” harus memiliki standar keamanan dan keselamatan bagi peserta didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK).

Cause:

- Kepala sekolah merasa apabila harus memasang kamera CCTV akan membutuhkan dana yang cukup besar.
- Kepala sekolah merasa tugas pemantauan keamanan sekolah dapat dilakukan sendiri, karena saat pagi hari kepala sekolah akan berkeliling memantau aktivitas sekolah, sehingga tidak diperlukan petugas keamanan.
- Menurut kepala sekolah, tabung pemadam kebakaran hanya barang insidental yang tidak selalu diperlukan setiap waktu.

Effect:

- Tidak adanya kamera CCTV menyebabkan barang/perengkapan sekolah yang hilang sulit dilacak.
- Tidak adanya kamera CCTV menyebabkan SDK. “X” tidak memiliki bukti rekaman apabila terjadi kecelakaan atau bencana yang menimpa peserta didik, ataupun PTK.
- Tidak adanya tabung pemadam kebakaran akan menyulitkan SDK. “X” saat menanggulangi bencana kebakaran yang dapat terjadi secara tiba-tiba. Selain itu, SDK. “X” juga tidak mematuhi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional R.I. No. 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA.
- Tidak adanya petugas keamanan saat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar menyebabkan orang-orang bebas masuk ke area SDK. “X”, baik itu orang tua/wali murid ataupun orang asing yang tidak berkepentingan, sehingga dapat membahayakan peserta didik.
- Tidak adanya petugas keamanan meningkatkan kemungkinan terjadinya risiko kecelakaan lalu lintas karena tidak ada petugas yang membantu menyeberangkan siswa/i saat akan masuk atau pulang sekolah.

- Mempengaruhi hasil akreditasi sekolah.

Recommendation: Dengan alasan keamanan bagi peserta didik dan PTK, maka auditor menyarankan agar SDK. "X" lebih memperhatikan standar keamanan dan keselamatan di sekolah, dengan cara memfungsikan petugas keamanan saat kegiatan belajar mengajar, memasang alat pengawasan (kamera CCTV), dan melengkapi sistem proteksi pasif dan/atau aktif untuk mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran (misal: tabung pemadam kebakaran).

4. Critical Problem Area

Conditions: Ada beberapa jabatan tenaga kependidikan yang tidak dijelaskan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya, antara lain: tidak adanya rincian tugas petugas kantin sekolah; dalam dokumen struktur organisasi terdapat fungsi petugas keamanan, padahal dalam praktiknya di lapangan tidak ada; kepala sekolah menangani keuangan kantin, padahal dalam *job description*-nya tidak meliputi tugas tersebut; serta petugas tata usaha sering mendapat tugas diluar tanggung jawabnya yang tercantum dalam *job description*, menyebabkan pekerjaan petugas tata usaha tidak efektif.

Criteria: Adanya prosedur dan kebijakan yang jelas tentang pembagian tugas dan wewenang untuk pimpinan, pendidik dan tenaga kependidikan.

Cause:

- *Job description* di SDK. "X" hanya mengatur tugas-tugas dari jabatan inti saja.
- Kepala sekolah harus menangani keuangan kantin untuk menggantikan bendahara, karena tugas bendahara yang begitu kompleks sehingga agak kesulitan jika harus menangani semuanya sekaligus (dijelaskan juga pada *critical problem area 1*).
- Petugas tata usaha dituntut untuk kreatif dan *flexible* dalam mengerjakan tugas, sehingga harus siap untuk mengerjakan tugas-tugas diluar *job description*-nya.

Effect:

- Untuk beberapa jabatan yang tidak ada rincian tugasnya akan menyulitkan saat dilakukan evaluasi, karena tidak diketahui batas-batas wewenang dan tanggung jawabnya.
- Petugas tata usaha sering mendapat tugas diluar tanggung jawabnya dalam *job description* dan tidak ada konsep yang diberikan, menyebabkan hasil pekerjaan petugas tata usaha kadang tidak sesuai dengan keinginan pemberi tugas, sehingga harus kerja dua kali.

Recommendation:

- Sebaiknya semua Pendidik dan Tenaga Kependidikan diberi *job description* secara jelas dan tertulis, agar dapat diketahui dengan pasti batas-batas wewenang dan tanggung jawabnya.
- Apabila terpaksa harus ada rangkap jabatan, maka sebaiknya dijelaskan pula rincian tugasnya.
- Apabila ada tugas tambahan diluar *job description*, seperti yang dialami petugas tata usaha, sebaiknya diberi konsep atau contoh yang jelas, untuk meminimalkan terjadinya kesalahan dan pengulangan pekerjaan yang sama.

5. Critical Problem Area:

Condition: Kurangnya transparansi pengelolaan dana pendidikan, karena selama ini SDK. “X” belum mempublikasikan laporan pengelolaan biaya investasi dan operasional, laporan pengelolaan dana pengadaan/perbaikan sarana dan prasarana, serta laporan keuangan kepada seluruh warga sekolah dan orang tua/wali murid.

Criteria:

- Mengacu pada Peraturan Pemerintah RI. No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan Pasal 52 huruf(1.) “*pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan dana dipertanggungjawabkan oleh satuan pendidikan secara transparan kepada pemangku kepentingan pendidikan terutama orang tua/wali peserta didik, dan penyelenggara satuan pendidikan*”.
- Mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19. tahun 2007 tertanggal 23 Mei 2007 yang mengatur “Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah” terkait bidang keuangan dan pembiayaan yang isinya sebagai berikut: *Pedoman pengelolaan biaya investasi dan operasional sekolah/madrasah disosialisasikan kepada seluruh warga sekolah/madrasah untuk menjamin tercapainya pengelolaan dana secara transparan dan akuntabel.*

Cause: Pihak sekolah merasa bahwa selama ini sudah SDK. “X” cukup transparan dengan melaporkan penggunaan dana pendidikan ke otoritas yang lebih tinggi yang meminta laporan pertanggungjawaban.

Effect:

- Tidak mematuhi peraturan perundang-undangan.
- Menurunkan kepercayaan publik terhadap sekolah terkait pengelolaan sumber daya sekolah.
- Mempengaruhi hasil akreditasi sekolah.

Recommendation: Sebaiknya SDK. “X” melaporkan pengelolaan sumber daya sekolah secara transparan dan akuntabel tidak hanya ke pemerintah dan yayasan, melainkan ke pihak-pihak terkait lainnya, seperti orang tua/wali murid, masyarakat, dan para penyumbang lainnya. Lapornya dapat melalui *website* resmi sekolah, dipajang pada papan pengumuman di sekolah, atau laporan tertulis secara rutin.

Penyusunan Laporan Hasil Audit

Tahap pelaporan merupakan tahap terakhir dari keseluruhan rangkaian audit operasional. Semua hasil pelaksanaan audit termasuk temuan dan rekomendasi disampaikan ke pihak manajemen SDK. “X” Sumenep.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penerapan audit operasional yang dilakukan terkait dengan aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan kegiatan penyelenggaraan pendidikan di SDK. “X” Sumenep telah menghasilkan beberapa hal yang dapat dikategorikan sebagai *critical problem area*. Dengan melakukan analisa pada pengendalian internal organisasi ini berdasarkan COSO *framework* serta memperhatikan aktivitas-aktivitas yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan di SDK. “X”, maka diperoleh temuan audit, dampak, dan rekomendasi agar

mutu pelayanan pendidikan di SDK. “X” – Sumenep dapat ditingkatkan, dengan ditunjang oleh transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pelayanan pendidikan.

Konklusi

Berdasarkan hasil audit operasional terhadap sistem pengendalian internal di SDK. “X”, diketahui masih terdapat beberapa kelemahan pada pengendalian internal yang memerlukan perbaikan. Berikut ini beberapa temuan audit yang diperoleh dari audit operasional yang telah dilaksanakan:

1. Terjadi perangkapan jabatan pada beberapa jabatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) di SDK. “X”. Perangkapan jabatan tersebut terjadi pada posisi bendahara SDK. “X” yang merangkap sebagai bendahara di unit karya lainnya dalam satu area (Poliklinik “X”, Taman Kanak-Kanak “X”, dan Biara “X”); Wali kelas III merangkap jabatan sebagai petugas kantin; serta kepala sekolah menangani keuangan kantin untuk menggantikan tugas bendahara.
2. Sering terjadi kehilangan atau kerusakan barang/perengkapan sekolah dan susah untuk dilacak.
3. Sistem keamanan dan keselamatan di SDK. “X” kurang memadai, karena tidak adanya alat pengawasan (misal: kamera CCTV) untuk memantau aset sekolah, aktivitas PTK dan aktivitas siswa/i di sekolah; tidak ada petugas keamanan saat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar; serta tidak adanya sistem proteksi pasif dan/atau aktif untuk mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran (misal: tabung pemadam kebakaran).
4. Ada beberapa jabatan tenaga kependidikan yang tidak dijelaskan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya, antara lain: tidak adanya rincian tugas petugas kantin sekolah; dalam dokumen struktur organisasi terdapat fungsi petugas keamanan, padahal dalam praktiknya di lapangan tidak ada; kepala sekolah menangani keuangan kantin, padahal dalam *job description*-nya tidak meliputi tugas tersebut; serta petugas tata usaha sering mendapat tugas diluar tanggung jawabnya yang tercantum dalam *job description*, menyebabkan pekerjaan petugas tata usaha tidak efektif.
5. Kurangnya transparansi pengelolaan dana pendidikan, karena selama ini SDK. “X” belum mempublikasikan laporan pengelolaan biaya investasi dan operasional, laporan pengelolaan dana pengadaan/perbaikan sarana dan prasarana, serta laporan keuangan kepada seluruh warga sekolah dan orang tua/wali murid.

Implikasi

1. Terjadinya perangkapan jabatan pada beberapa jabatan PTK di SDK. “X”, hal ini menyebabkan PTK tidak fokus dalam mengerjakan tugasnya. Selain itu, dapat meningkatkan risiko terjadinya penyalahgunaan wewenang.
2. Seringnya terjadi kehilangan atau kerusakan barang/perengkapan sekolah dapat menyebabkan SDK. “X” mengalami kerugian material apabila tidak segera ditindaklanjuti.
3. Kurang memadainya sistem keamanan dan keselamatan di SDK. “X” dapat meningkatkan risiko kehilangan pada aset organisasi dan risiko kecelakaan pada siswa/i.

4. Pada beberapa jabatan yang tidak ada rincian tugasnya akan mengakibatkan kesulitan saat dilakukan evaluasi, karena tidak diketahui batas-batas wewenang dan tanggung jawabnya. Selain itu, petugas tata usaha yang sering mendapat tugas diluar tanggung jawabnya dalam *job description* dan tidak ada konsep yang diberikan, menyebabkan hasil pekerjaan petugas tata usaha kadang tidak sesuai dengan keinginan pemberi tugas, sehingga harus kerja dua kali.
5. Kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana pendidikan dapat mengakibatkan menurunnya kepercayaan publik terhadap sekolah terkait pengelolaan sumber daya sekolah, selain itu dapat mempengaruhi akreditasi sekolah, karena dalam akreditasi juga memperhatikan aspek transparansi pengelolaan dana.

Rekomendasi

1. Mengingat tugas bendahara yang begitu kompleks, sebaiknya menambah staf baru untuk menjabat sebagai bendahara, sehingga kepala sekolah tidak perlu terlibat lagi pada tugas-tugas yang seharusnya merupakan tanggung jawab bendahara. Paling tidak menambah satu orang staf, sehingga dapat berbagi tugas dengan bendahara lama dalam menangani keuangan di empat unit karya tersebut. Untuk pengelolaan kantin, sebaiknya kantin sekolah disewakan ke pihak luar, sehingga tidak perlu repot mengelola persediaan kantin dan pembuatan laporan-laporan yang terkait aktivitas kantin.
2. Mengenai sering terjadinya kehilangan atau kerusakan barang/perlengkapan sekolah di SDK. "X", sebaiknya disediakan surat peminjaman barang, jadi jika ada pihak-pihak yang akan meminjam barang, harus mengisi surat terlebih dahulu. Surat tersebut ditandatangani oleh peminjam barang dan koordinator/penanggungjawab inventaris sekolah. Selain itu, di sekitar gudang dapat diberi alat pengawasan seperti kamera CCTV, sehingga barang/perlengkapan sekolah dapat dipantau dengan mudah.
3. Mengenai sistem keamanan dan keselamatan, sebaiknya SDK. "X" lebih memperhatikan standar keamanan dan keselamatan di sekolah, dengan cara memfungsikan petugas keamanan saat kegiatan belajar mengajar, memasang alat pengawasan (kamera CCTV), dan melengkapi sistem proteksi pasif dan/atau aktif untuk mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran (misal: tabung pemadam kebakaran).
4. Mengenai rincian tugas PTK, sebaiknya semua PTK diberi *job description* secara jelas dan tertulis, agar dapat diketahui dengan pasti batas-batas wewenang dan tanggung jawabnya. Apabila terpaksa harus ada rangkap jabatan, maka sebaiknya dijelaskan pula rincian tugasnya. Untuk tugas tambahan diluar *job description*, sebaiknya diberi konsep atau contoh yang jelas, untuk meminimalkan terjadinya kesalahan dan pengulangan pekerjaan yang sama.
5. Mengenai transparansi pengelolaan dana pendidikan, sebaiknya SDK. "X" melaporkan pengelolaan sumber daya sekolah secara transparan dan akuntabel tidak hanya ke pemerintah dan yayasan, melainkan ke pihak-pihak terkait lainnya, seperti orang tua/wali murid, masyarakat, dan para penyumbang lainnya. Lapornya dapat melalui *website* resmi sekolah, dipajang pada papan pengumuman di sekolah, atau laporan tertulis secara rutin.

Keterbatasan Penelitian

Peneliti melakukan penelitian ini dengan meninjau sistem pengendalian internal di SDK. “X” dengan jangka waktu pengambilan data dari bulan Mei 2014 hingga Oktober 2014. Dalam penelitian ini ada beberapa temuan yang tidak dapat ditindaklanjuti, karena bukan kewenangan peneliti untuk menindaklanjutinya. Dasar pertimbangan yang digunakan adalah diperlukannya pengetahuan khusus untuk membahas teknik pengajaran dan temuan berikut ini dapat menjadi masukan penelitian bagi peneliti-peneliti lain yang sedang mendalami ilmu pendidikan. Temuan-temuan tersebut antara lain:

1. Tenaga pendidik (guru) belum menggunakan pengantar *bilingual* dan belum menggunakan perangkat teknologi informasi untuk menunjang pembelajaran.
2. Metode pembelajaran di kelas cenderung monoton, karena kegiatan belajar mengajar lebih banyak dilakukan dengan cara mendikte materi-materi yang ada dibuku dan mencatat materi yang ditulis guru di papan tulis.
3. Beberapa Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) di SDK. “X” masih belum memenuhi syarat kualifikasi akademik minimum yang ditentukan oleh pemerintah.

Selama melakukan penelitian terhadap aktivitas operasional di SDK. “X”, peneliti mengalami kesulitan dalam hal pengumpulan data, terutama data finansial karena pimpinan sekolah tidak berkenan memberikan beberapa dokumen yang dibutuhkan. Peneliti juga kesulitan dalam mengatur jadwal wawancara dengan PTK, karena PTK harus mengerjakan tugasnya dengan tepat waktu, sehingga peneliti harus mengatur jadwal agar tidak mengganggu jalannya kegiatan belajar mengajar dan kegiatan operasional lainnya. Selain itu, karena jarak objek penelitian yang sangat jauh, menyebabkan peneliti membutuhkan waktu yang cukup lama dalam pengumpulan data.

DAFTAR PUSTAKA

- Arens, A.A., Elder, R.J. and Beasley, M.S. 2012. *Auditing and Assurance Service : An Integrated Approach, 14th Edition*. New Jersey, USA: Pearson Education, Inc.
- Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah. 2009. *Perangkat Akreditasi SD/MI*. Jakarta, Indonesia.
- CNN Indonesia. 2014. *Standar Pelayanan Sekolah Dasar dan Menengah Masih Minim*. Terdapat di: <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20141211140014-20-17509/standar-pelayanan-sekolah-dasar-dan-menengah-masih-minim/>, diakses 15 Desember 2014).
- Efferin, Sujoko, Stevanus Hadi Darmadji, dan Yuliawati Tan. 2008. *Metode Penelitian Akuntansi: Mengungkap Fenomena dengan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Enofe, A.O., Mgbame, C.j., et al. 2013. *The Role of Internal Audit in Effective Management in Public Sector*. Research Journal of Finance and Accounting Vol.4 No.6. Terdapat di: <http://www.iiste.org/Journals/index.php/RJFA/article/download/5660/5772>, diakses 6 Januari 2015).

- Institut Akuntan Publik Indonesia. 2013. *Standar Profesional Akuntan Publik SA 200 - Tujuan Keseluruhan Auditor Independen Dan Pelaksanaan Audit Berdasarkan Standar Audit*. Jakarta, Indonesia: Salemba Empat.
- Jha, S.K. 2013. *Operational Audit for Improving Future Business Operations*. Paripex – Indian Journal of Research Vol. 2 Issue: 11. Terdapat di: (http://theglobaljournals.com/paripex/file.php?val=November_2013_1384851190_f4a34_50.pdf, diakses 18 Maret 2014).
- Moeller, Robert R. 2009. *Brink's Modern Internal Auditing: A Common Body of Knowledge, 7th Edition*. New Jersey, USA: John Wiley & Sons.
- Molavi, Mehran and Imani, Abbas. 2014. *Operational Audit: Reflections on the Ethics of the Process and Ethical Approach*. Cahiers De Paiolive Journal, Special Issue. Terdapat di: (<http://www.ijiq.com/Special%20Issue%202014%20-%20CAHIERS%20DE%20PAIOLIVE/fulltext%20articles/fulltext%20%2853%29.pdf>, diakses 7 Januari 2015).
- Mulyadi. 2010. *Auditing*. Jilid I, Cetakan ke Tujuh. Jakarta, Indonesia: Salemba Empat.
- Okezone News. 2014. *Jamdiknas dan Akses Pendidikan untuk Anak Indonesia*. Terdapat di: (<http://news.okezone.com/read/2014/10/31/65/1059277/jamdiknas-dan-akses-pendidikan-untuk-anak-indonesia>, diakses 15 Desember 2014).
- Rai, I Gusti Agung. 2008. *Audit Kinerja Pada Sektor Publik: Konsep, Praktik, dan Studi Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Reider, Rob. 2002. *Operational Review: Maximum Result at Efficient Cost, 3rd edition*. New York, USA : John Wiley and Sons, Inc.
- Republik Indonesia. 2002. *Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 Amandemen ke Empat*. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2008. *Peraturan Pemerintah RI No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan*. Lembaran Negara RI Tahun 2008, No. 91. Sekretariat Negara RI. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2007. *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah*. Kementerian Pendidikan Nasional RI. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2007. *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah (SD/ MI), Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah (SMP/ Mts), dan Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah (SMA/ MA)*. Kementerian Pendidikan Nasional RI. Jakarta.

- Romney, Marshall B., and Steinbart, Paul J. 2009. *Accounting Information System, 12th edition*. New Jersey, USA: Pearson Education, Inc.
- Tunggal, Widjaja Amin. 2012. *Pedoman Pokok Operational Auditing*. Jakarta, Indonesia: Harvarindo.

